

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait topik yang dibahas saat ini dan penelitian ini merupakan pengembangan materi dan penelitian yang pernah ada.

##### **1. Fina Riyanti (2017)**

Judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **2. Hamsinar (2017)**

Judul penelitian “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Kabupaten Pinrang”. Hasil dari penelitian ini partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan sistem pengendalian intern sebagai

variabel moderasi menguatkan pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**3. Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono dan Astrid Maharani (2019)**

Judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo”. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

**4. Maria Susanti Liu (2020)**

Judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul”. Hasil penelitian ini adalah variabel independen akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.

**5. Ni Kadek Gino Melinda dan Putu Cita Ayu (2020)**

Judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Lembaga Pengkreditan Desa Se-Kecamatan Gianyar”. Hasil penelitian ini adalah kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan pemahaman akuntansi berbasis akruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pada lembaga pengkreditan desa se Kecamatan Gianyar.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari topik yang relevan dengan penelitian ini terdapat persamaan pada variabel dependen (Y) yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan referensi penggunaan Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen (X). Sedangkan perbedaan mendasar antara kelima penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Surabaya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Kegunaan Keputusan**

Teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) pertama kali digunakan oleh Chambers. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan *stakeholders* yaitu menyediakan informasi keuangan mengenai suatu organisasi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan stakeholder yaitu menyediakan informasi keuangan mengenai suatu organisasi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan. Teori ini mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan juga dapat dipahami. Menurut (Lestari & Dewi, 2020) teori kegunaan keputusan teknologi informasi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus

dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

Hubungan teori kegunaan keputusan dengan kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang dibuat dengan baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka suatu laporan keuangan akan memberikan kemudahan kepada para penggunanya untuk membuat suatu keputusan dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya komponen seperti Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dimana nantinya kualitas laporan keuangan tersebut sesuai standar yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### **2.2.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas suatu kinerja atau program yang telah dilakukan (Septiningtyas, 2018). Dengan adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka akuntabilitas dijadikan prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *good governance*.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Menurut Indra Bastian (2010:385) akuntabilitas publik adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1 Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas 16 kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.
- 2 Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut Sulistoni (2003) ciri – ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu :

- Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi

masyarakat.

- Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
- Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut Merialsa (2017) dilaksanakannya tiga komponen dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan yaitu:

a Integritas Keuangan.

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah.

b Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

c Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Menurut Madiasmo (2004, 21) ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan- kebijakan yang diambil.

Jadi akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara terhadap publik.

### 2.2.3 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Siahaan, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi (Siahaan, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi pemerintah yang ditunjang dengan hukumnya yang jelas, akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat

terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator, salah satunya adalah laporan pemerintah daerah.

Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek (Risnayanti, 2020), yaitu :

- 1) Komunikasi publik oleh pemerintah, merupakan suatu kompleksitas pilihan pilihan yang dinyatakan oleh banyak orang yang berkaitan dengan sesuatu isu yang dipandang penting oleh umum;
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi, Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dalam segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Adapun dimensi transparansi yang telah dijelaskan Hadi Sumarsono (2009) yaitu:

- 1) Terdapat komunikasi publik oleh pemerintah berupa laporan keuangan mudah diakses dan terbukanya informasi mengenai proses.
- 2) Akseibilitas masyarakat terhadap transparansi dalam pembuatan alapan keuangan berpa sistem pemberian informasi kepada publik.

Dan pada akhirnya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.

#### **2.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia perusahaan atau organisasi sebagai pengguna sistem perlu memiliki tingkat pengetahuan profesional yang

memadai, atau setidaknya kemauan untuk terus belajar dan mengasah keterampilannya. Fokus utama sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi atau perusahaan. Untuk meningkatkan sumber daya manusia perusahaan perlu memperhatikan kualitas sumber dayanya, dalam hal ini kompetensi atau kualitas pegawai harus ditingkatkan guna mewujudkan pegawai yang berdaya saing lebih tinggi dan aktivitas sumber daya manusia yang dilakukan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.

Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang atau kemampuan sumber daya manusia yang memungkinkan mereka untuk melakukan kinerja luar biasa dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Definisi Kompetensi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah sebagai berikut : “Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan”. Suatu tingkat kompetensi diperlukan untuk memahami tingkat pekerjaan yang diharapkan pada kategori baik atau sedang. Penetapan ambang batas kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar untuk proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Wardani et al (2017) mengembangkan indikator terkait kompetensi sumber daya manusia, sebagai berikut:

- 1 Kemampuan individu dimaksudkan untuk menentukan apakah pegawai pemerintah dapat menyusun laporan keuangan.

- 2 Peran dan fungsi pencapaian tujuan yang bertujuan untuk memahami peran dan fungsi pegawai dalam pelaksanaan tanggung jawabnya di instansi.
- 3 Memahami prosedur dan proses akuntansi yang bertujuan untuk memahami ada tidaknya pedoman prosedur dan proses akuntansi.
- 4 Pelatihan berkala bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pelatihan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya.

#### **2.2.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu, (Monica, 2011). Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain, Nordiawan, dkk (2012). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan menjadi alokasi sumber daya.

Menurut Iman Mulyana (2010), kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010:

A. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dibuat dengan tepat waktu. Selain itu, informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mempertegas atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

B. Andal

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan terhindar dari kesalahan yang material, bersifat netral dan menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi.

C. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan milik entitas lain yang sejenis.

D. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk maupun istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna agar pengguna dapat mempelajari informasi yang

dimaksud secara mudah.

## **2.3 Rerangka Pemikiran**

### **2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

#### **Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran (Widodo, 2011). Pelaku kebijakan publik dalam hal ini adalah instansi pemerintah harus dapat bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan sepak terjangnya kepada publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Disebutkan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di Pemerintah (Halim et al.,2012) . Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan.

Menurut penelitian Fina Riyanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian Tika Septyaningtyas (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Kendal sehingga akuntabilitas tidak

memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Christina Novita (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

#### **Pemerintah Daerah**

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah (Arifin Tahir, 2011:165).

Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga ada interaksi masyarakat dalam mengawasi serta menilai program-program pemerintah yang sudah atau belum terealisasi serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik

Menurut Asmara Intan Merlas (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam

memberikan informasi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kepada publik.

Menurut penelitian Fina Riyanti (2017) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa trabsparansi tidak mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Maria Susanti Liu (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam memberikan informasi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kepada publik.

### **2.3.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas**

#### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan salah satu yang dihasilkan oleh sumber daya manusia alam bidang akuntansi. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian entitas terkait. Agar dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam membuat laporan keuangan. Teori sumber daya menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keunggulan kompetitif. Maka dari itu teori tersebut dapat dijadikan menjadi

dasar dari kompetensi sumber daya manusia dalam menyajikan laporan keuangan.

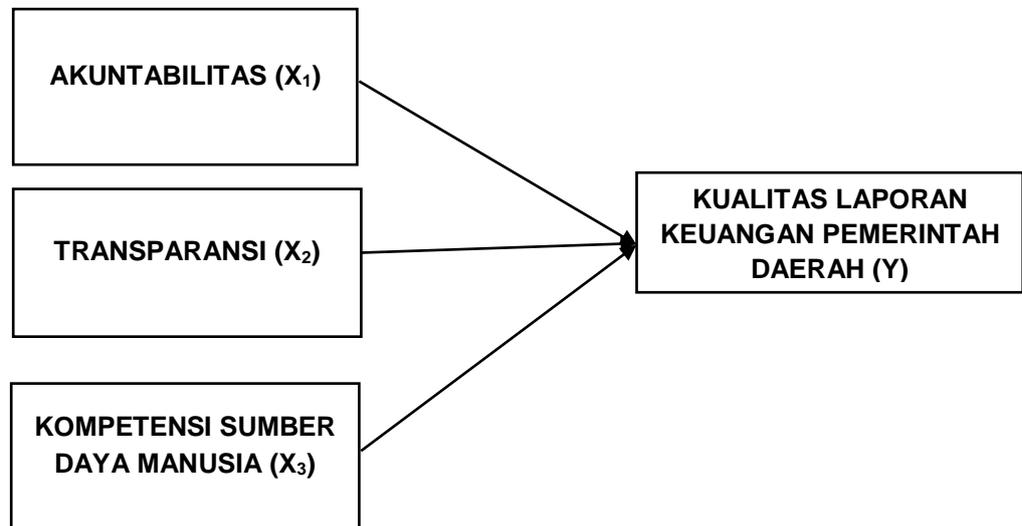
Menurut Putriasri Pujarina (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal itu berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang ada maka laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin berkualitas karena waktu pembuatan laporan keuangan tersebut dapat efisien, efektif dan ekonomis.

Menurut Tawaqal Suparno (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang ada maka laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin berkualitas.

Menurut Khoirina Kencana (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan sumber daya yang dimiliki mengenai SAK ETAP sehingga laporan keuangan masih belum andal.

Penelitian ini menjelaskan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Surabaya dan digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Rerangka Pemikiran**



Sumber: Peneliti

## 2.4 Hipotesis

Sugiyono (2017:63) mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban baru berdasarkan dari teori yang relevan maka dari itu dikatakan sementara.

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> :Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya

H<sub>2</sub> :Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya

H<sub>3</sub> : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya